

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai analisis pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun) Diyah Puji Lestari, Darminto & Topowijono (2013)	Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh pada PT. Bank Jatim Cabang Madiun dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan sudah mencerminkan pengendalian kredit yang baik, karena para karyawan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai kebijakan yang diterapkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Madiun.

2	<p>Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank DKI</p> <p>Febriana Marcha (2014)</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Mikro</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank DKI sudah berjalan dengan efektif. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti auditor internal tidak dilibatkan dalam penilaian risiko</p>
3	<p>Peran Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Empiris Pada Bank BTPN Cabang BANGKALAN)</p> <p>M Lukman Assidiki & Ni Nyoman Alit Triani (2015)</p>	<p>Pengendalian Internal Pemberian Kredit</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Bank BTPN Cabang Bangkalan telah menerapkan pengendalian internal dan pendanaan kredit yang baik, namun ada pemantauan yang tidak memadai yang dilakukan oleh bank terhadap kondisi bisnis debitur setelah kredit didanai sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar kredit (<i>Non Performing Loan</i>) yang telah ditangani sebelumnya.</p>
4	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit (Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesi Cabang Limboto)</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia, Cabang Limboto.</p>

	Nita M. Sabi (2012)			
5	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit BNI Fleksi (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Utama BOGOR) Shefy Fadhillah Akbar, Budiman Slamet & Lia Dahlia Iryani (2017)	Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit	Deskriptif Eksploratif	Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa Sistem pengendalian internal pemberian kredit BNI Fleksi secara keseluruhan sudah memadai dan efektivitas pemberian kredit telah dilaksanakan secara efektif
6	Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri) Munawaroh (2011)	Peran Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal telah efektif diimplementasikan.
7	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Rakyat	Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis

	Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang) Sonia Dwi Fatiah, Darminto & M.G. Wi Endang NP (2014)			kredit dan penagihan kredit. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai, hal tersebut dapat dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit.
8	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada BRI KCP BOULEVARD MANADO Hesty Harun (2013)	Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Usaha	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern kredit usaha pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., KCP Boulevard Manado sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian intern yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik oleh COSO.
9	<i>A Study on Effectiveness of the Internal Control System in the Private Banks of Trincomalee</i>	<i>Effectiveness of the Internal Control System</i>	<i>Qualitative</i>	<i>In the overall analysis, all variables are moderately supportive in the effectiveness of internal control. That is five independent</i>

	S.Kumuthinidevi (2016)			<i>variables are moderately supportive in the effectiveness of internal control. And all respondents have accepted that independent variables are in the moderate level.</i>
10	<i>Implementing The Internal Control System In The Islamic Microfinance Institutions</i> Sepky Mardian & Rabitha Nabila Haifa (2013)	<i>Implementing The Internal Control System</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The study found that the internal control system at 13 BMTs in Depok were effective. This is supported by the results of the answers to the questionnaire related to 86% effectiveness of internal controls. However, it is still found weaknesses in the lack of spontaneous checks on the use of funds by customers, incompleteness flowchart and pre-numbered documents.</i>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang implementasi pengendalian internal dalam proses pemberian kredit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada obyek yang diteliti, dimana penelitian ini dilakukan di bank perkreditan rakyat yaitu di PD. BPR Bank Jombang, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di beberapa bank umum di Indonesia.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Kredit

2.2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin yaitu “*creditum*” yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh sebab itu yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan. (Harun, 2013)

Pengertian kredit menurut Kasmir (2014: 72) yaitu kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Purwatiasih, et al, 2014)

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 ayat 12 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur) dimana atas pinjaman yang diberikan tersebut pihak peminjam (debitur) berkewajiban untuk membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut kepada pihak yang memberi pinjaman (kreditur) dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak kreditur dan pihak debitur.

2.2.1.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014: 75-76) unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit adalah :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit

2. Kesepakatan

Di dalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara pemberian kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang

4. Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian kredit semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya adalah terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsure kesengajaan lainnya

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank

2.2.1.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014: 97-98) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa penerima kredit

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang

Kredit dapat diberikan oleh bank dan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara

2.2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2014: 76-79) :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan dalam melakukan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi
 - b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa
 - b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha
 - c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan usaha debitur dibidang perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi
 - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan
4. Dilihat dari segi jaminan
- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur
 - b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik debitur selama ini
5. Dilihat dari sektor usaha
- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
 - b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk membiayai jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi
 - c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar

- d. Kredit pertambangan, kredit ini adalah jenis usaha tambang yang biayanya biasanya dalam jangka panjang, misalnya tambang emas atau minyak
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa
- f. Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah

2.2.1.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014: 91-94) dalam melakukan penilaian kredit secara umum menggunakan prinsip 5C dan 7P, yaitu :

1. Prinsip 5C :

- a. *Character*, yaitu mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas, segala tekad yang baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur
- b. *Capacity*, yaitu pertimbangan dengan cara menilai kemampuan debitur untuk sanggup melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau akan dibiayai dengan kredit tersebut
- c. *Capital*, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur
- d. *Collateral*, yaitu pertimbangan dengan menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diterima

- e. *Condition*, yaitu pertimbangan dengan melihat batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang ada, yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat

2. Prinsip 7P :

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah
- b. *Party* (golongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit

- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau barang atau orang atau jaminan asuransi

2.2.2 Sistem Pemberian Kredit

Sistem pemberian kredit merupakan rangkaian dari cara/prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. Sistem pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

1. Tugas dan tanggungjawab (Kuncoro dan Suhardjono, 2009: 99-109)

a. Seksi administrasi kredit

Tugas dari seksi administrasi kredit adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan kredit sampai kredit tersebut lunas

b. Seksi analisis kredit

Tugas utama dari seksi analisis kredit adalah melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha

nasabah baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instansi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan status hukumnya

c. Seksi monitoring kredit

Tujuan utamanya adalah memonitor perkembangan usaha dan ketepatan membayar bunga dan angsuran pokok kredit

d. Seksi asuransi

Tugas utamanya adalah melakukan administrasi kredit yang diasuransikan baik asuransi jaminan kredit, asuransi jiwa, debeturnya, maupun asuransi kreditnya sendiri

e. Seksi penagihan tunggakan

Tugas utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kredit-kredit yang sudah macet

f. Bagian pelayanan dana dan jasa

Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah/calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dipergunakan

g. Bagian pelayanan pinjaman/kredit

Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, agunan kredit, perhitungan bunga, dan sebagainya

h. Bagian kasir/teller

Tugas utama dari bagian ini adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penarikan maupun penyetoran uang

i. Bagian akuntansi

Tugas-tugas bagian akuntansi meliputi :

- 1) Mencetak laporan-laporan keuangan, antara lain neraca dan laba rugi
- 2) Melakukan verifikasi atas transaksi pembukuan berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang ada
- 3) Memastikan bahwa semua kegiatan bagian operasional telah dibukukan pada hari tersebut

2. Dokumen pemberian kredit

- a. Dokumen permohonan kredit, dokumen ini merupakan formulir yang harus diisi oleh nasabah apabila akan mengajukan kredit yang biasanya berisikan alasan mengapa nasabah akan mengajukan kredit
- b. Dokumen analisis kredit, merupakan dokumen untuk melakukan proses analisa kredit yang biasanya dilakukan melalui proses survey kepada nasabah
- c. Dokumen putusan kredit, merupakan hasil dari analisa kredit yang berisi keputusan akan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan kredit tersebut

- d. Dokumen jaminan kredit, merupakan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan kredit
- e. Dokumen pengikat jaminan kredit, merupakan surat yang dibuat untuk sebagai bukti atas barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah dalam pengajuan kredit
- f. Dokumen pencairan kredit, merupakan dokumen yang berisikan keterangan bahwa pengajuan kredit telah disetujui dan akan dicairkan
- g. Dokumen perjanjian kredit, dokumen ini dibuat setelah ada persetujuan pencairan kredit. Dokumen ini mengatur tentang pasal-pasal antara nasabah dengan pihak bank dan nasabah berkewajiban membayar kembali pinjamannya berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

3. Proses pemberian kredit

- a. Tahap kegiatan prakara dan permohonan kredit

Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan dengan menggunakan dokumen permohonan dari lembaga pemberi kredit. Atas permohonan tersebut, lembaga pemberi kredit akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak

b. Tahap analisis dan evaluasi kredit

Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas pemohon
- 2) Tujuan permohonan kredit
- 3) Riwayat hubungan bisnis dengan lembaga pemberi kredit
- 4) Analisis 5C kredit

c. Tahap pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekonomian kredit berdasarkan analisis/evaluasi yang dibuat oleh penganalisis kredit. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat analisis kredit. Apabila perekomendasi lebih merasa yakin atas rekomendasinya serta kelengkapan dokumennya, selanjutnya menyerahkan dokumen kredit tersebut kepada pejabat pemutus dan mempertahankan pendapatnya bila diperlukan

d. Tahap pemberian putusan kredit

Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan memberikan tandatangan pada formulir putusan kredit. Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya dokumen kredit diserahkan

kepada administrasi kredit untuk dipersiapkan dokumen lainnya, seperti :

- 1) Surat penawaran putusan kredit, surat ini memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam surat penawaran tersebut harus diacantumkan batas waktu kepada nasabah untuk memberikan persetujuan atau penolakan
- 2) Dokumen perjanjian kredit, perjanjian kredit memuat unsur-unsur perjanjian yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam putusan kredit dan memuat agunan yang diberikan dan pengikatannya
- 3) Dokumen untuk pencairan, dokumen pencairan kredit merupakan pengikat nasabah dengan bank yang mengatu hak dan kewajiban kedua belah pihak

2.2.3 Pengendalian Internal

2.2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Comitte of Sponsoring Organization (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan seluruh staf dan karyawan yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan beberapa pertimbangan meliputi :

- a) Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
- b) Keandalan pelaporan keuangan

c) Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Taswan (2010: 163) pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Atau dalam pengertian lain pengendalian intern merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan.

2.2.3.2 Komponen Pengendalian Internal

Terdapat lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) atau disebut dengan model pengendalian COSO. Kelima komponen tersebut adalah :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, dan sebagai landasan bagi komponen pengendalian intern lainnya dengan menciptakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup :

a) Komitmen terhadap Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas seseorang secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

b) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku perusahaan, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Unsur ini meliputi tindakan manajemen untuk mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, dan tidak etis. Selain itu, unsur ini juga meliputi cara manajemen mengkomunikasikan nilai integritas dan etika kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan, dan cara berperilaku.

c) Dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan pengendalian intern. Komite

audit beranggotakan seluruh atau terutama terdiri dari pihak luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangan, dan kepatuhannya terhadap hukum, peraturan, dan standar yang terkait.

d) **Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen**

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dilaksanakan

e) **Struktur Organisasi**

Dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan struktur organisasi, karena struktur organisasi dapat memberikan rerangka untuk menunjang aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan secara jelas pembagian wewenang dan tanggung jawab para pegawai, serta keterkaitan yang saling berhubungan dari antar bagian satu dengan bagian lainnya.

f) **Pembagian Wewenang dan Pembebanan Tanggung Jawab**

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan dan pengembangan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi harus ada sistem yang mengatur pembagian

wewenang dan tanggung jawab untuk mengotorisasi suatu aktivitas. Jika satu unit dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan mengakibatkan timbulnya kecurangan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

g) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan praktik yang sehat berhubungan dengan kebijakan perekrutan, pelatihan, tindakan-tindakan pendisiplinan atas pelanggaran, evaluasi, dan promosi kerja. Hal tersebut dapat menentukan apakah personil perusahaan memiliki tingkat integritas yang diharapkan, nilai etika, dan kompetensi. Aspek paling penting dari pengendalian intern adalah karyawan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern dapat dikurangi sampai batas minimum, dan tetap dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah

dikenal, hukum dan peraturan baru, perubahan standar risiko. Penilaian risiko terdiri dari :

a) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah kegiatan untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan terhadap faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi maupun faktor internal meliputi kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi

b) Analisis risiko

Analisis risiko meliputi mengestimasi signifikansi risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi, sehingga risiko dapat memperkirakan akibat dari terjadinya risiko dan dapat melakukan tindakan yang dapat meminimalkan risiko tersebut

1. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur bahwa memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk

mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mencakup :

a) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi

b) Pemisahan fungsi yang memadai

Pemisahan fungsi antar unit pada organisasi memiliki tujuan pokok yaitu untuk mencegah dan deteksi secara dini atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang

c) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Perlindungan secara fisik adalah cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk catatan dan dokumen. Catatan dan dokumen adalah objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan

d) Pemeriksaan independen atas kinerja

Pemeriksaan harus independen karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.

Manajemen melakukan pemeriksaan atas kinerja berfungsi untuk menilai pekerjaan karyawan apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau belum

e) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Desain dokumen yang sederhana akan meminimalkan kemungkinan kesalahan pencatatan, dan mendukung pencatatan yang efisien

2. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk menggolongkan, mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab setiap karyawan berkenaan dengan sistem informasi perusahaan. Informasi dan komunikasi mencakup :

a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid

Perusahaan harus mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. Contohnya bank harus mencatat semua transaksi pembayaran angsuran kredit, pelunasan kredit, penerimaan kas

berupa tabungan, dan sebagainya. Apabila ada transaksi bank yang tidak tercatat, maka akan muncul ketidaksesuaian antara catatan pihak bank dan catatan milik nasabah atau debitur

b) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat

Perusahaan harus mencatat transaksi sesuai dengan periode akuntansi yang tepat. Hal ini berfungsi supaya informasi pada transaksi dapat sesuai dengan kronologis dan peristiwa ekonomi yang telah terjadi pada perusahaan, sehingga informasi pada periode akuntansi dapat relevan bagi pengguna laporan keuangan.

c) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui pengevaluasian periodic secara terpisah. Pengawasan dilaksanakan oleh personel yang berwenang melakukannya, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern berubah/tidak. Pengawasan mencakup :

a) Supervisi yang efektif

Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja pegawai, mengoreksi kesalahan, dan melindungi asset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap asset perusahaan

b) Audit internal

Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen, hukum dan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen

2.2.3.3 Sistem Pengendalian Internal

Pengertian sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Menurut Taswan (2010: 163) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pengertian sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.(Munawaroh, 2011)

2.2.3.4 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Taswan (2010:164-173)mengatakan bahwa unsur-unsur pokok pengendalian intern meliputi:

- a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas
- b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Hanya pejabat yang memiliki wewenang yang dapat menyetujui terjadinya suatu transaksi. Sebuah organisasi harus membuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi
- c) Praktik-praktik yang sehat. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah:
 1. Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
 2. Pemeriksaan mendadak
 3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau satu unit organisasi lain
 4. Perputaran jabatan (*job rotation*)
 5. Keharusan pengambilan cuti bagi pegawai yang berhak

6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain (*Internal control*)

d) Pegawai yang tingkat kecakapannya sesuai dengan tanggungjawabnya

2.2.3.5 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Taswan (2010: 81-82) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a) Tujuan Operasi

Tujuan operasi terkait dengan pencapaian misi dasar entitas. Tujuan-tujuan ini bervariasi berdasarkan pilihan manajemen yang berkaitan dengan struktur, pertimbangan industri, dan kinerja entitas, terkait untuk operasi dalam divisi, anak perusahaan, unit operasi, dan fungsi, diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menggerakkan entitas menuju tujuan utamanya

b) Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan handal. Tujuan pelaporan mungkin berhubungan dengan pelaporan keuangan maupun non keuangan dan pelaporan internal atau eksternal. Tujuan pelaporan internal didorong oleh kebutuhan intern dalam menanggapi berbagai kebutuhan potensial. Tujuan pelaporan eksternal terutama didorong oleh peraturan dan atau standar yang telah ditetapkan

c) Tujuan Kepatuhan

Dalam melakukan kegiatan sebuah entitas sering mengambil tindakan tertentu, tentunya harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari menentukan tujuan kepatuhan, organisasi perlu memahami hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh entitas

2.2.4 Kredit Fiktif

Kredit fiktif adalah penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah. Atau dalam pengertian lain kredit fiktif adalah salah satu modus kejahatan perbankan yang melibatkan pihak internal untuk melakukan serangkaian tindakan antara lain membuat identitas palsu pelanggan, menghapus, mengaburkan, menyembunyikan, menghilangkan, dan melanggar ketentuan yang harus dipenuhi dalam memberikan fasilitas kredit, sehingga penyaluran kredit dilakukan untuk orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan pinjaman. (<http://nugascepat.blogspot.com> diakses pada 10-12-2018, 08.17)

Kasus kejahatan perbankan kredit fiktif bisa melibatkan orang yang bekerja di bank, di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Modus kejahatan kredit fiktif dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang

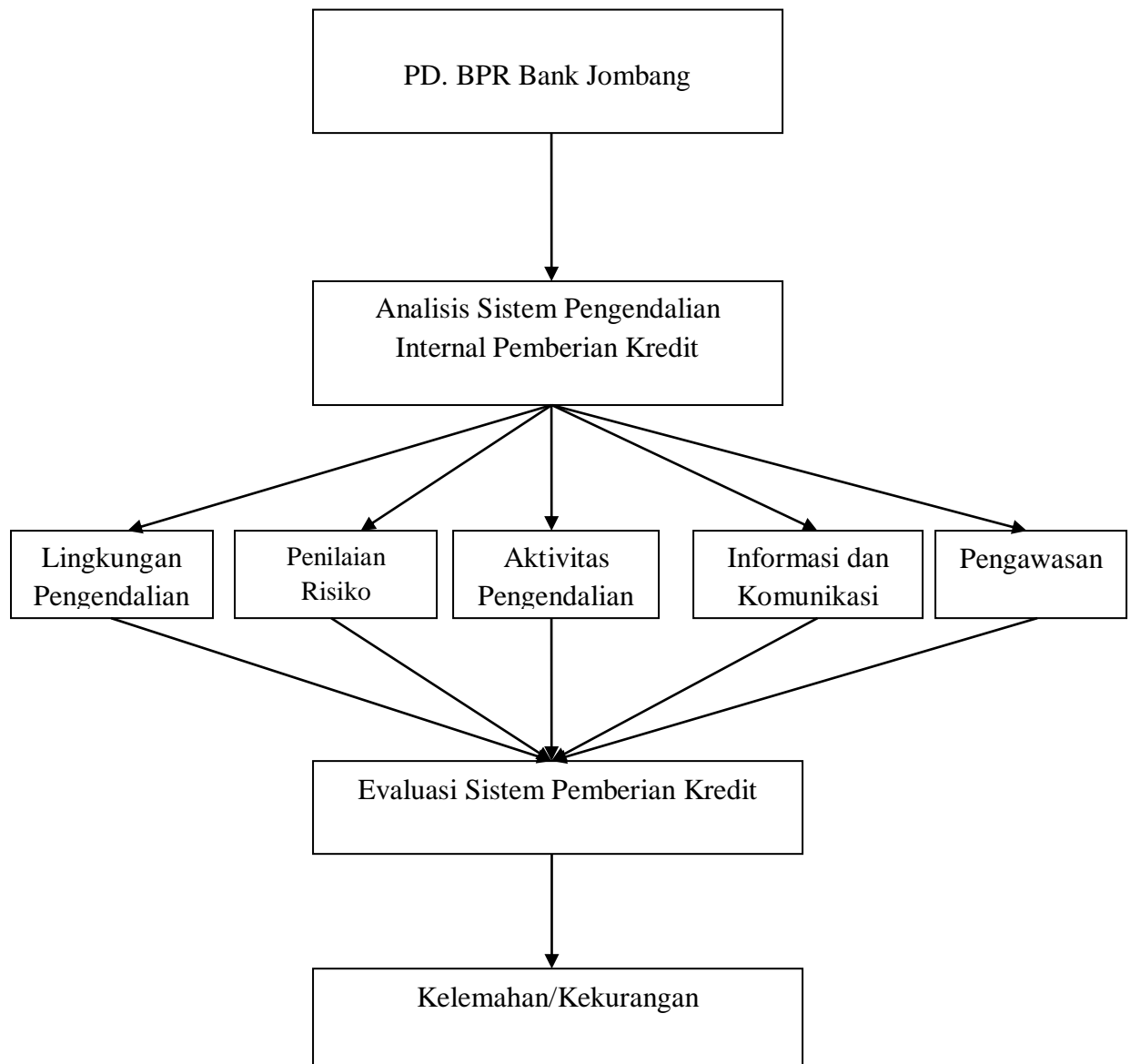
dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit.

Tanggung jawab analis kredit menimbulkan perilaku curang yang mungkin dilakukan dengan sengaja, baik oleh pihak nasabah maupun analis kredit itu sendiri. Perbuatan curang tersebut memungkinkan seorang analis kredit dapat dikenai sanksi baik dalam sanksi administrasi maupun sanksi pidana atas keterkaitannya dengan meloloskan permohonan kredit yang tidak layak diajukan debitur atau calon nasabah. Terkait hal ini, dalam proses memutuskan kredit, analis tidak bekerja sendiri sehingga ada pihak lain yang dapat juga ikut serta dikenai sanksi.

Jadi, kredit fiktif dapat diketahui setelah kredit tersebut sebagai kredit macet dan telah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Kredit fiktif dapat diketahui dengan menganalisis kredit. Hal ini dapat dilihat dari debitur yang mengajukan kredit dengan data-data fiktif atau dokumen yang tidak memenuhi syarat dalam pengajuan kredit, sehingga menjadikan kredit tersebut bermasalah dan merugikan pihak bank.

2.3 Kerangka Konseptual

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Bank Jombang. Adapun langkah yang dilakukan peneliti untuk mengetahui tujuan tersebut adalah dengan menganalisis

sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Bank Jombang dengan menggunakan komponen-komponen pengendalian internal COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, dan pengawasan. Dari analisis komponen pengendalian internal tersebut akan diketahui dimana letak kelemahan/kekurangan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PD. BPR Bank Jombang sebagai bahan evaluasi/perbaikan.

